

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun

Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) ini diperlukan agar program yang akan dibuat ke depan terarah dan sesuai dengan arah kebijakan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta serta mengacu pada arah kebijakan pusat. Oleh karena itu Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta memandang Renja ini sebagai hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi kelancaran kegiatan dimasa yang akan datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 adalah menjabarkan Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 adalah sebagai pedoman SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor ... Seri ...);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri A);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor ..... Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2008 – 2012 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017, maka sasaran prioritas pembangunan bidang kepegawaian adalah pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan sehubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013.

Kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2012-2017 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, yang menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2012-2017. Ada 7 (tujuh) program yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan masing-masing program tersebut direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan disahkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada setiap tahun anggaran.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan direalisasikan pada tahun 2012 sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan telah ditetapkan dalam renja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2012 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel.1  
 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kantor Perwakilan  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.097.708.258	2.407.564.056	100	1.733.653.621	72.01	673.910.435	27.99
A	<b>GAJI DAN TUNJANGAN</b>	1.009.733.258	1.133.719.056	100	1.089.651.621	96.11	44.067.435	3.89
B	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PNS</b>	1.087.875.000	1.273.845.000	100	644.002.000	50.56	629.843.000	49.44
II	<b>PENDAPATAN</b>	35.000.000	-	100	21.065.000	60.19	13.935.000	66.15

Tabel 2  
 Realisasi Belanja Langsung Kantor Perwakilan  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.554.200.000</b>	<b>7.102.997.000</b>	<b>100</b>	<b>3.622.442.369</b>	<b>51.00</b>	<b>3.480.554.631</b>	<b>49.00</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.345.184.000</b>	<b>2.619.313.000</b>	<b>100</b>	<b>2.442.606.069</b>	<b>93.25</b>	<b>176.706.931</b>	<b>7.23</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.950.000	40.950.000	100	23.691.000	57.85	17.259.000	42.15
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	180.000.000	180.000.000	100	142.895.541	79.39	37.104.459	20.61
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42.000.000	42.000.000	100	42.000.000	100.00	-	0.00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	756.700.000	895.020.000	100	851.868.945	95.18	43.151.055	4.82
5	Penyediaan Peralatan dan	19.184.000	66.774.000	100	66.633.000	95.50	3.141.000	4.50

	Perlengkapan Kantor							
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	386.350.000	386.350.000	100	386.098.600	99.93	251.400	0.07
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.000.000	50.000.000	100	47.815.000	95.63	2.185.000	4.37
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	75.000.000	100	67.872.000	90.50	7.128.000	9.50
9	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	100	59.120.000	98.53	880.000	1.47
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	19.335.583	96.68	664.417	3.32
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	40.219.000	100	35.681.600	88.72	4.537.400	11.28
12	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	100	4.900.000	68.06	2.300.000	31.94
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100	21.090.000	84.36	3.910.000	15.64
14	Penyediaan Makanan Dan Minuman	269.000.000	269.000.000	100	215.319.500	80.04	53.680.500	1996
15	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350.000.000	425.000.000	100	424.485.300	99.88	514.700	0.12

16	Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.800.000	33.800.000	100	33.800.000	100.0	-	0.00
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>677.616.000</b>	<b>3.896.475.000</b>	<b>100</b>	<b>603.105.400</b>	<b>15.48</b>	<b>3.293.369.600</b>	<b>84.52</b>
17	Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur	-	3.218.859.000	100	-	0.00	3.218.859.000	100.00
18	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	456.200.000	456.200.000	100	386.073.000	84.63	70.127.000	15.37
19	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.420.000	19.420.000	100	17.244.900	88.80	2.175.100	11.20
20	Kegiatan Pengadaan Meubelair	41.260.000	41.260.000	100	40.960.000	99.27	300.000	0.73
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	160.736.000	160.736.000	100	158.827.500	98.81	1.908.500	1.19
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>31.100.000</b>	<b>74.439.000</b>	<b>100</b>	<b>73.086.100</b>	<b>98.18</b>	<b>1.352.900</b>	<b>1.82</b>
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	31.100.000	57.039.000	100	55.746.100	97.73	1.292.000	2.27
23	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	17.400.000	100	17.340.000	99.66	60.000	0.34

<b>D</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>100.300.000</b>	<b>112.770.000</b>	<b>100</b>	<b>107.095.200</b>	<b>98.22</b>	<b>5.674.800</b>	<b>1.78</b>
24	Kegiatan Pengadaan Barang-Brang Bercorak Kebudayaan	77.550.000	90.020.000	100	85.225.200	94.67	4.794.800	<b>5.33</b>
25	Kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya	22.750.000	22.750.000	100	21.870.000	96.13	880.000	3.87
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100</b>	<b>396.549.600</b>	<b>99.14</b>	<b>3.450.400</b>	<b>0.86</b>
26	Kegiatan Dialog Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat	400.000.000	400.000.000	100	396.549.600	99.14	3.450.400	0.86
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>3.554.200.000</b>	<b>7.102.997.000</b>	<b>100</b>	<b>3.622.442.369</b>	<b>51.00</b>	<b>3.480.554.631</b>	<b>49.00</b>

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, maka Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

#### **A. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi**

Urusan Wajib Pemerintahan dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Pada tahun 2012, anggaran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta pada APBD adalah sebesar Rp.5.651.908.258,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.097.708.258,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp.3.554.200.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran Kantor Perwakilan menjadi Rp.9.510.561.056,- (mengalami penambahan sebesar Rp.3.858.652.798,-), dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.2.407.564.056,- dan belanja langsung sebesar Rp.7.102.997.000,-.

#### **B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2012 urusan pemerintahan dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.102.997.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.622.442.369,- atau 51.00 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.480.554.631,- atau 49.00 %.

*Outcome* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pembangunan antara lain:

## **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Administrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp.2.345.184.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.2.619.313.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp.274.129.000,-) dengan 16 (enam belas) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.2.442.606.069 atau 93.25 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.176.706.931,- atau 6.75 %.

*Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

*Output* kegiatan : tersedianya pelayanan jasa administrasi surat menyurat untuk kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

### **2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

*Output* kegiatan : tersedianya jasa telepon, air dan listrik untuk gedung kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

### **3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional**

*Output* kegiatan : terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor roda 4 sebanyak : 8 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak : 7 unit, selama 12 bulan / 1 tahun.

### **4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

*Output* kegiatan : tersedianya jasa administrasi keuangan kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

### **5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

*Output* kegiatan : tersedianya jasa petugas kebersihan dan tersedianya bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor selama 12 bulan / 1 tahun.



**6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

*Output* kegiatan : terpeliharanya perbaikan peralatan kerja gedung kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

**7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**

*Output* kegiatan : tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

**8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

*Output* kegiatan : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

**9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor**

*Output* kegiatan : tersedianya alat-alat instalasi listrik / penerangan gedung kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

**10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

*Output* kegiatan : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 1 unit mesin *fotocopy*, 3 unit komputer, 2 unit printer, 1 unit mesin *faximilie*.



**Gambar 18.4.1**  
**Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

### 11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

*Output* kegiatan : tersedianya bahan pembersih dan peralatan rumah tangga kantor selama 12 bulan / 1 tahun, yaitu bantal kepala 15 buah, bantal guling 15 buah, keset kaki 25 buah, sandal kamar 75 buah, handuk 25 buah, rak handuk 10 buah, *box toiletris* 10 buah, kembang hias 10 buah, perlengkapan kamar mandi 1 paket, pengharum ruangan 60 buah, bendera merah putih 2 lembar, bendera lambang provinsi 2 lembar.



**Gambar 18.4.2**

### **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga**

### 12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

*Output* kegiatan : tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah untuk kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

### 13. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

*Output* kegiatan : tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan / 1 tahun.

**14. Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman**

*Output* kegiatan : tersedianya makanan dan minuman bagi tamu mess Perwakilan di Jakarta dan tersedianya makan dan minum jamuan rapat selama 12 bulan / 1 tahun

**15. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

*Output* kegiatan : terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan / 1 tahun.

**16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan, Administrasi Perkantoran**

*Output* kegiatan : tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan / 1 tahun.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD sebesar Rp.677.616.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.3.896.475.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp.3.218.859.000,-) dengan 5 (lima) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.603.105.400,- atau 15.48 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.293.369.600,- atau 84.52 %.

*Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kantor.

**1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional**

*Output* kegiatan : tersedianya kendaraan dinas operasional Honda CRV sebanyak 1(satu) unit.



**Gambar 18.4.3**

**Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional**

**2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

*Output* kegiatan : tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif dan memadai yang terdiri dari taplak meja 20 lembar, jam dinding 10 unit, tanaman hias 20 pot, tabung gas 12 kg 1 unit, kompor gas 2 tungku 1 unit, *water dispenser* 1 unit, toples 12 buah, setrika 2 unit, mesin cuci 1 tabung *automatic* 1 buah.



**Gambar 18.4.4**  
**Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

### **3. Kegiatan Pengadaan *Meubelair***

*Output* kegiatan : tersedianya *meubelair* kantor yang representatif dan memadai yang terdiri dari meja kerja 1 biro 2 unit, meja kerja ½ biro 4 unit, kursi 1 biro 4 unit dan kursi ½ biro 8 unit.



**Gambar 18.4.5**  
**Kegiatan Pengadaan *Meubelair* Meja dan Kursi Kantor**

#### **4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**

*Output* kegiatan : terpeliharanya secara rutin / berkala 1 (satu) unit gedung kantor dan 1 (satu) unit Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam 12 bulan / 1 tahun.



**Gambar 18.4.6**  
**Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**  
**dan**  
**Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Anjungan Babel di**  
**TMII**

#### **5. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur**

*Output* kegiatan : Adapun Pada kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini yang dianggarkan pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran ini dikarenakan waktu pelelangan yang sangat terbatas dan mobil yang diinginkan yaitu *Lexus* sampai saat ini *Lexus* Indonesia hanya melayani

penjualan kendaraan *on the road* yaitu harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan ongkos kirim, dan tidak dapat dilaksanakan dengan pembelian *off the road* atau *GSO (Government Sales Operation)* yaitu harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan ongkos kirim sedangkan pengadaan kendaraan dinas tersebut harus dilakukan pembelian dengan kondisi harga plat merah *off the road (GSO)*. Adapun pagu dana anggaran yang tersedia telah dikembalikan kepada Kas Negara.

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada APBD sebesar Rp.31.100.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.74.439.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp.43.339.000,-) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.73.086.100,- atau 98.18 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.352.900,- atau 1.82 %. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

#### **1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya**

*Output* : tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan / atributnya untuk 31 orang PNS dan 27 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) / tenaga kontrak,



**Gambar 18.4.7**  
**Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya**

2. **Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**  
*Output* kegiatan : tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk 31 orang PNS dan 27 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) / tenaga kontrak.



**Gambar 18.4.8**  
**Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**

#### **IV. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada APBD sebesar Rp.100.300.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.112.770.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp.12.470.000,-) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.107.095.200 atau 98.22 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.5.674.800,- atau 1.78 %.



*Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah meningkatnya promosi dan informasi tentang Kebudayaan dan Keseniaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**1.Kegiatan : Pengadaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan**

*Output* kegiatan : tersedianya barang-barang bercorak kebudayaan berupa 1 (satu) pasang pakaian pengantin adat Bangka, 1 (satu) pasang pakaian pengantin adat Belitung, 1 (satu) pasang pakaian bujang dayang adat Bangka, 1 (satu) pasang pakaian bujang dayang adat Belitung.



**Gambar 18.4.9**  
**Kegiatan Pengadaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan**  
**Pakaian Pengantin Adat Bangka dan Pengantin Adat Belitung**

**2>Nama Kegiatan : Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya**

*Output* kegiatan : terselenggaranya pelatihan tarian daerah Bangka Belitung setiap 2 (dua) kali dalam 1 minggu.



**Gambar 18.4.10**  
**Kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya**

## **V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah pada APBD sebesar Rp.400.000.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.400.000.000,- (mengalami penambahan/pengurangan sebesar Rp. 0) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.396.549.600,- atau 99.14 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.450.400,- atau 0.86 %.

*Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Pelayanan Kedinasan adalah meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

### **1. Kegiatan Dialog Audiensi Dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat**

*Output* kegiatan : terselenggaranya kegiatan dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.



**Gambar 18.4.11**  
**Kegiatan Dialog Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat.**

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

### **1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Penghubung di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 12 Januari 2003, yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

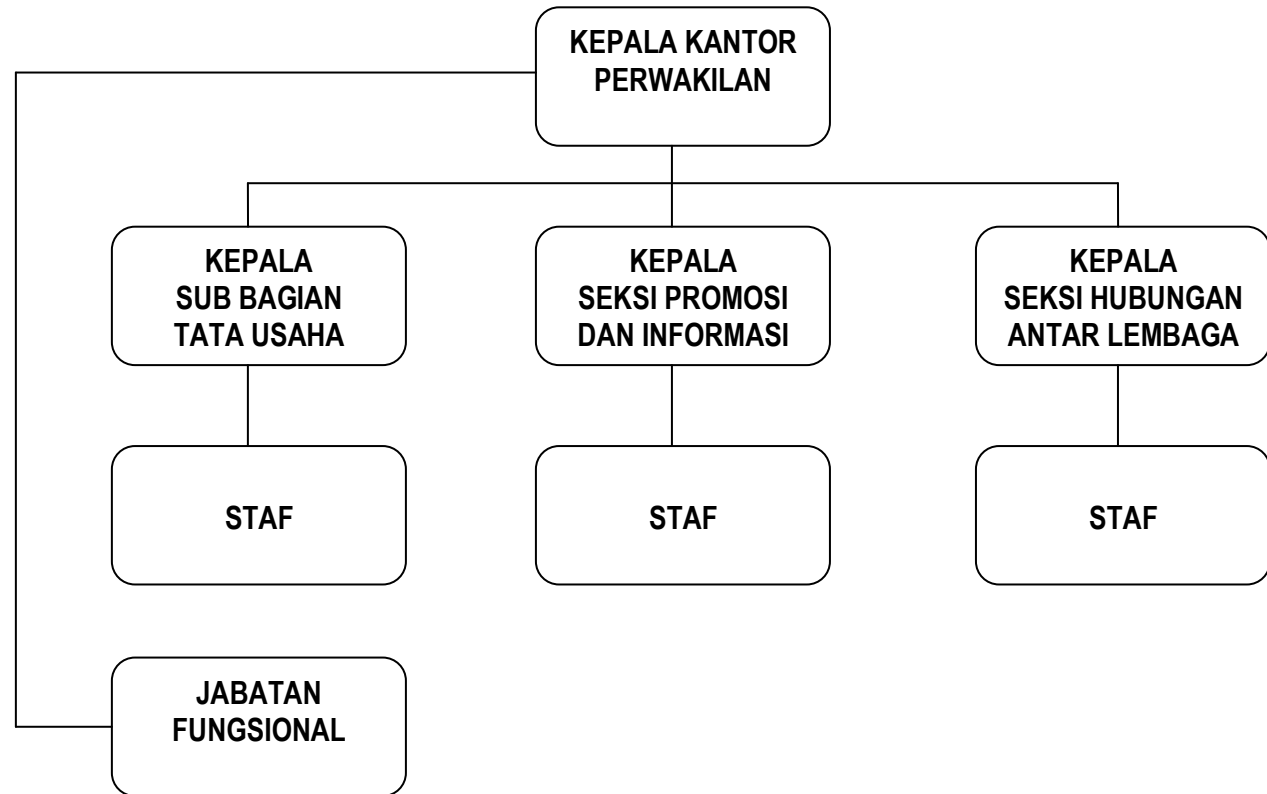
Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013) (***gambar struktur terlampir***) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Perwakilan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Promosi dan Informasi
- d. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERWAKILAN POVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2013, Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### **2.1.1 Kepala Kantor**

Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai **tugas pokok** membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang hubungan antara lembaga, promosi serta informasi di Jakarta ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.2 Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, perlengkapan, surat menyurat, protokuler, keuangan, kepegawaian, tata usaha serta hubungan masyarakat. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan urusan rencana dan program kerja kantor ;
- b. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan kantor ;
- c. Menyiapkan laporan tahunan kantor ;
- d. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor ;
- e. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor ;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;

- g. Melaksanakan administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan ;
- i. Melaksanakan urusan kehumasan ;
- j. Melaksanakan administrasi perkantoran ;
- k. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data, dan bahan menurut ketentuan ;
- l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;
- m. Melaksanakan pembinaan staf.

### **2.1.3 Seksi Promosi dan Informasi**

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi dan informasi, memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah. Seksi Promosi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan promosi dan informasi ;
- b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan promosi dan informasi ;
- d. Mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seni budaya, pariwisata, pameran, promosi dan informasi di anjungan daerah TMII;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan promosi dan informasi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

- f. Melaksanakan administrasi seksi promosi dan informasi ;
- g. Melaksanakan pembinaan staf ;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **2.1.4 Seksi Hubungan Antar Lembaga**

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dalam Hubungan Antar Lembaga, melakukan pembinaan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya serta memfasilitasi pelayanan Hubungan Antar Lembaga. Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Bangka Belitung ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga baik antar lembaga pemerintah, swasta, maupun domestik untuk kelancaran hubungan kerja ;
- c. Menyiapkan pedoman yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga ;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kegiatan hubungan antar lembaga ;
- e. Membuat rencana dan program kerja seksi hubungan antar lembaga;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan ;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya dalam rangka peningkatan



- peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- h. Melaksanakan administrasi seksi hubungan antar lembaga ;
  - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data bahan menurut ketentuan yang berlaku ;
  - j. Melaksanakan pembinaan staf ;
  - k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **3. Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta**

#### **A. Sumber Daya Aparatur**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan status kepegawaian 31 (tiga puluh satu) orang PNS, 1 (satu) orang CPNS dan 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Harian Kontrak (PHK) (data per Januari 2014). Adapun para pegawai ada yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ).

**Tabel 3**  
**KLASIFIKASI PNS DAN CPNS**  
**KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI**  
**JAKARTA**  
**BERDASARKAN TINGKAT ESELON ( PER JANUARI 2014)**

<b>NO.</b>	<b>ESSELON</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	II A	-	-	-
2.	II B	-	-	-
3.	III A	1	-	1
4.	III B	-	-	-
5.	IV A	1	2	3
6.	IV B	-	-	-
7.	Non Esselon	15	12	27
8.	Fungsional	-	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>

**Tabel 4**  
**KLASIFIKASI PNS DAN CPNS**  
**KANTOR PERWAKILAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ( PER JANUARI 2014)**

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI LAKI- LAKI</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	<b>Doktoral / S-3</b>	-	-	-
2.	<b>Pasca Sarjana / S-2</b>	4	2	6
3.	<b>Sarjana / S-1</b>	8	10	15
4.	<b>Diploma -IV</b>	-	-	-
5.	<b>Diploma-III</b>	1	1	3
6.	<b>Diploma -I/II</b>	-	-	-

7.	<b>SLTA</b>	4	2	10
8.	<b>SLTP</b>		-	-
9	<b>SD</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran**

Prasarana gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta saat ini yang berlokasi di Jalan Kedondong Raya Nomor 13 Rawamangun Jakarta Timur belumlah cukup representatif baik dilihat dari bangunan maupun dari segi lansekap atau tata ruang. Hal ini menjadi kendala karena ruang yang ada terlalu sempit dan tidak mencukupi untuk menampung 58 (lima puluh delapan) orang pegawai. Selain itu gedung kantor tersebut berada di lokasi pemukiman penduduk yang juga digunakan sebagai Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sangat perlu dicari alternatif gedung kantor lain yang lebih representatif dan lebih memenuhi persyaratan sebagai kantor sehingga bila semua itu terpenuhi maka akan semakin meningkatkan fungsi dan tugas pelayanan dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan selain itu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi jasa usaha sewa kamar. Selain itu Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta juga membawahi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Dalam hal sarana di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sudah tersedia cukup memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Komputer	7 Unit	
2.	Lap top	5 Unit	
3.	Printer	10 Unit	
4.	Lemari Arsip	3 Unit	
5.	AC	16 Unit	
6.	<i>In focus</i>	1 Unit	
7.	Sofa	6 Set	
8.	Kendaraan dinas roda 4	8 Unit	
9.	Kendaraan dinas roda 2	7 Unit	
10.	Meja Komputer	16 Unit	
12.	Meja Kerja	33 Buah	
13.	Kursi Kerja	24 Buah	
14.	<i>Filing Cabinet</i>	3 Unit	
15.	Mesin Ketik	2 Unit	
16.	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit	
17.	Telepon	2 Unit	
18.	Mesin <i>Faximilie</i>	2 Unit	
19.	Tabung Pemadam Kebakaran	5 Unit	
20.	Mesin Fotocopy	2 Unit	
21.	<i>Sound System</i>	1 Unit	
22.	Kamera Digital	2 Unit	
23.	Brankas / <i>Safety Box</i>	1 Unit	
24.	Filling besi / metal	5 Unit	
25.	Televisi	20 Unit	
26.	<i>Fresher</i>	1 Unit	
27.	DVD player	1 Unit	
28.	Tempat tidur kayu (lengkap)	15 Set	
29.	Lemari es	5 Unit	
30.	Kasur busa / matras	41 Set	

31.	Lemari pakaian	11 Unit	
32.	<i>Microphone</i>	5 Unit	
33.	<i>Microphone floor stand</i>	4 Unit	
34.	Parabola	1 Unit	
35.	Kursi lipat	123 Buah	
36.	Dispenser	3 buah	
37.	Kompore gas	2 Buah	
38.	Lemari Hias / pajangan	3 Buah	
39.	<i>White board</i>	1 Buah	
40.	Lemari kaca	3 Buah	
41.	<i>White board electronic</i>	1 Unit	
42.	<i>Vacuum cleaner</i>	1 Buah	
43.	Kaca hias pajangan	1 Buah	
44.	Setrika	2 Buah	

#### **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 maka Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu :

## 1. Meningkatnya Pelayanan Tugas-Tugas Sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta baik itu tingkat nasional maupun internasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

## 2. Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari meningkatnya optimalisasi pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memanfaatkan potensi aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Kantor Perwakilan, Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diharapkan akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi jasa yang dilakukan. Dari tahun 2007-2011 pendapatan dari hasil penerimaan retribusi selalu melampaui dari target yang ditetapkan hal ini merupakan suatu prestasi sendiri bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung di Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### 3 Pengelolaan Kantor dan Mess Perwakilan serta Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah

Kebijakan pengelolaan Kantor dan Mess Perwakilan Provinsi serta Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal daerah Bangka Belitung dan pejabat pemerintah Daerah Bangka Belitung yang dibantu dan difasilitasi sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 - 2012, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ;
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada dalam rangka menunjang kegiatan sebagai perwakilan pemerintahan;
3. Belum dipahaminya arti penting Kantor Perwakilan sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ibukota;
4. Belum optimalnya koordinasi antara SKPD didaerah dengan Kantor Perwakilan;
5. Belum representatifnya Kantor dan Mess Perwakilan Daerah yang ada di Jakarta ;

6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten / Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
8. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
9. Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Mess Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kurang representatif dimana gedung Kantor dan Mess berada di daerah wilayah pemukiman penduduk dan bukan di daerah wilayah gedung perkantoran hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya peningkatan gedung sehingga menyebabkan luas bangunan yang sangat terbatas tersebut harus dibagi antara ruang Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ruang Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dari para karyawan kantor maupun dari tamu yang menginap di mess tersebut.



- b. Masih perlunya ditingkatkan lagi pemahaman dan dukungan bersama dari SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan arti pentingnya peran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugasnya demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- c. Masih belum dimaksimalkan pemanfaatan potensi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah.
- d. Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Banyaknya SDM tetapi tidak disertai kualitas dari SDM itu sendiri.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha membenahi sarana dan prasarana gedung Kantor Perwakilan secara bertahap dan telah adanya wacana untuk pengadaan gedung dan mess Kantor Perwakilan di Jakarta yang baru dan lebih representatif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada tamu mess Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kekayaan daerah yang ada pada Kantor Perwakilan di Jakarta.
2. Telah dilakukan upaya langkah-langkah peran aktif dalam membina hubungan baik dalam peningkatan kerjasama yang efektif antara Kantor Perwakilan dengan SKPD lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh instansi dan lembaga terkait.

3. Telah dilakukan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif untuk pemanfaatan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di TMII antara lain dengan mempromosikan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengadakan acara pameran, pagelaran seni dan budaya daerah dalam rangka mempromosikan pariwisata dan budaya daerah masing-masing juga bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta paguyuban masyarakat daerah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
4. Sudah adanya upaya dan pembahasan untuk Peningkatan Status Eselonering Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
5. Pengiriman SDM untuk mengikuti diklat dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi aparatur.

### **3. Prestasi Kerja**

Prestasi kerja yang dicapai Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti Pusat, Regional, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya :

1. Ikut serta sebagai Peserta Pameran dan Promosi Temu Usaha Kemitraan Agribisnis dalam acara *Batam Agri Business Expo* Tahun 2012 di Batam pada bulan November 2012.

2. Ikut serta sebagai Peserta Pameran dan Promosi dalam acara Gebyar Produk Indonesia *Expo 2012 Makassar International Education And Training Expo 2012 Celebes Agro Expo 2012* pada bulan November 2012.
3. Ikut serta sebagai Peserta *Belitong Exotic Culture and Culinary 2012* Destinasi Wisata Asia di Jakarta pada bulan November 2012.
4. Ikut serta dalam acara Pawai Budaya dalam rangka HUT TMII tanggal 20 April 2012.
5. Ikut serta dalam acara Citra Budaya Tari tanggal 21 April 2012.
6. Ikut serta dalam Lomba Tari Daerah di Desa Seni TMII tanggal 27 Oktober 2012.
7. Ikut memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional yang diikuti oleh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain Rakornis Gubernur se Indonesia dengan Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan internasional lainnya.
8. Sebagai salah satu SKPD yang mempunyai pendapatan dari pemungutan retribusi daerah, Kantor Perwakilan Bangka Belitung selalu dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan. Tetapi pada Tahun Anggaran 2012 ini target yang dicapai hanya mencapai 88 %, hal ini dikarenakan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang mengatur masalah Retribusi Daerah yang terbaru, baru diberlakukan pada bulan September 2012.
9. Memfasilitasi kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain memfasilitasi pasien yang memerlukan penanganan khusus di RSCM, RS jantung Harapan Kita dan sebagainya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka telah disusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan sebagaimana terdapat di dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan tersebut dalam renstra SKPD, selain didasarkan pada kebutuhan pegawai juga didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan / diatur dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2012 dan 2013, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam rancangan awal RKPD melalui forum SKPD dan Musrenbang, sehingga tidak ada jenis program dan kegiatan yang baru/berbeda. Adanya perbedaan dari jumlah anggaran yang diusulkan dan yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).

Adapun review program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap rancangan awal RKPD.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, penetapan program dan kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, hanya mengacu pada Program dan Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari para Pemangku Kepentingan, seperti LSM, asosiasi-asosiasi, ataupun Perguruan Tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Dalam rangka melaksanakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, maka telah ditetapkan kebijakan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Untuk

melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, maka telah ditetapkan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011.

Tujuan ditetapkannya kebijakan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Inti dari reformasi birokrasi adalah kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dengan menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

Sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi, maka berdasarkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2012 – 2017, yaitu **“Perwujudan Good Governance dan Clean Government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung”**, telah ditetapkan strategi dan kebijakan daerah yang dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta adanya kesepakatan semua pihak baik pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat mulai tahun 2007 dan seterusnya, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Pemerintah secara terus menerus serta pemberian "*Reward and Punishment*" sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip adil dan merata.
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang berbasis *good governance* dan *clean government*.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang berfungsi untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi atau lembaga. Dari tujuan akan tampak kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi/lembaga dalam melaksanakan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Tujuan organisasi atau lembaga haruslah konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi/lembaga. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi lembaga serta visi dan misi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam membantu pelayanan Pemerintah Daerah/Gubernur dalam lingkup tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012- 2017 yaitu :

a. Tujuan :

- 1) Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
- 2) Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab
- 4) Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas di Jakarta.
- 5) Merelokasi Kantor Perwakilan dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ke tempat yang lebih memadai dan representatif.
- 6) Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- 2) Meningkatkannya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
- 3) Terwujudnya PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab.
- 4) Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam



tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana gedung Kantor dan Mess daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih memadai dan representatif

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2012 - 2017 untuk Tahun 2014 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan:
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional
  - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - 7) Pengadaan Alat Tulis Kantor
  - 8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
  - 9) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
  - 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

- 12) Penyediaan bahan logistik kantor
  - 13) Penyediaan makanan dan minuman
  - 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
  - 15) Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
  - 16) Pengelolaan *Website*
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:
    - 1) Pengadaan Peralatan gedung kantor
    - 2) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
    - 3) Pengadaan sarana pendukung di anjungan
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :
    - 1) Training Motivasi dan Keagamaan
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi kegiatan :
    - 1). Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
    - 1). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  6. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
    - 1) Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat
  7. Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
    - 1) Pengadaan tanah / lahan keperluan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
    - 1) Pengadaan barang-barang bercorak kebudayaan
    - 2) Pelatihan sanggar tari seni dan budaya di anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 3) Keikutsertaan pameran produk khas daerah
- 4) Pagelaran Seni drama tari Bangka Belitung

Untuk Tahun 2014, sebagai implementasi dari Renstra tahun 2013-2017, sesuai Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang telah disusun, maka untuk mencapai sasaran yang ada, telah direncanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dananya berasal dari APBD.

**Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 Kantor Perwakilan**

No.	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan	Kebutuhan Dana Indikatif	Sumber Dana
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	1. Penyediaan jasa Surat Menyurat	Prosentase (%) tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	50.000.000,-	APBD
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik Kantor Perwakilan selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	228.000.000,-	APBD
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	Prosentase (%) tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	1.377.960.000,-	APBD
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terealisasinya pembayaran jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	115.020.000,-	APBD
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terealisasinya ketersediaan jasa kebersihan Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Jakarta	529.500.000,-	APBD

	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase (%) tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang dapat terawat dengan baik	Kantor Perwakilan	Jakarta	71.500.000,-	APBD
	7. Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase (%) tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor Perwakilan selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	144.000.000,-	APBD
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase (%) tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	88.700.000,-	APBD
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Prosentase (%) tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Jakarta	40.000.000,-	APBD
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase (%) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Perwakilan	Jakarta	29.410.000,-	APBD
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase (%) tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Perwakilan yang dapat difungsikan dengan baik	Kantor Perwakilan	Jakarta	46.580.000,-	APBD

	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase (%) jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Perwakilan	Jakarta	14.760.000,-	APBD
	13. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya bahan logistik Kantor Perwakilan selama 1 tahun	Kantor Perwakilan	Jakarta	40.000.000,-	APBD
	14. Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase (%) penyediaan / pembelian jenis makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat	Kantor Perwakilan	Jakarta	234.000.000,-	APBD
	15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah PNS / Pejabat yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Perwakilan	Jakarta	420.606.200,-	APBD
	16. Pengelolaan <i>website</i>	Jumlah artikel dan informai yang di muat dalam <i>Website</i> Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Jakarta	66.000.000,-	APBD

<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase (%) tercukupinya peralatan gedung Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Jakarta	70.130.000,-	APBD
	2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Prosentase (%) sarana dan prasarana kantor dan anjungan yang terawat dengan baik	Kantor Perwakilan	Jakarta	203.170.000,-	APBD
	3. Pengadaan sarana pendukung di anjungan TMII	Prosentase (%) ketersediaan sarana pendukung di anjungan TMII	Kantor Perwakilan	Jakarta	100.210.000,-	APBD
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase (%) peningkatan jumlah pegawai yang memiliki pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor Perwakilan	Jakarta	119.380.000,-	APBD

<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	1. Training motivasi dan keagamaan	Peningkatan sikap positif, disiplin dan motivasi dari PNS Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Jakarta	194.200.000,-	APBD
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku / laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Perwakilan	Jakarta	17.440.000,-	APBD
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>					
	1. Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat	Prosentase (%) jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial & masyarakat	Kantor Perwakilan	Jakarta	547.130.000,-	APBD



<b>7.</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah</b>					
	1. Pengadaan tanah / lahan keperluan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen pengadaan tanah / lahan untuk keperluan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kantor Perwakilan	Jakarta	20.215.960.000,-	APBD
<b>8.</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					
	1. Pengadaan barang-barang bercorak kebudayaan	Ketersediaan jumlah barang-barang bercorak kebudayaan yang mendukung kegiatan di TMII	Kantor Perwakilan	Jakarta	31.417.000,-	APBD
	2. Pelatihan Sanggar tari Seni dan Budaya di anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta sanggar tari dan seni budaya yang mengikuti pelatihan	Kantor Perwakilan	Jakarta	40.885.000,-	APBD
	3. Keikutsertaan Pameran Produk	Prosentase (%) jumlah pengunjung yang datang pada	Kantor Perwakilan	Jakarta	105.400.000,-	APBD

	Khas Daerah	pameran produk khas daerah				
	4. Pagelaran Seni Drama Tari Bangka Belitung	Prosentase (%) jumlah pengunjung/ masyarakat yang menyaksikan pagelaran seni drama tari Bangka Belitung	Kantor Perwakilan	Jakarta	69.925.000,-	APBD

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ini merupakan komitmen Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak dan terutama jajaran aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Perumusan dan penyusunan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2014 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini, maka akan dilakukan pembahasan dalam forum SKPD maupun Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang belum terakomodir ataupun diakomodir dengan pengurangan pagu anggaran.

Demikian Renja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2014 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.